

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden).¹

Dalam studi pelaksanaan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses pelaksanaan.

Meter dan Horn yang dikutip Winarno mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*. Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.²

¹Abdul Wahab Solichin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 64.

²Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002), h. 102.

Terkait dengan tindakan, maka tindakan yang dimaksud adalah mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi pelaksanaan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi pelaksanaan tersebut.

Selanjutnya Nugroho menyatakan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.³

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Apa itu *policy* atau kebijakan? Donovan dan Jackson dalam Keban menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.⁴

³Ryant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003), h. 158

⁴Yeremias Keban T, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* (Yogyakarta : Gaya Media, 2004), h. 51.

James E. Anderson yang dikutip oleh Wahab juga mengemukakan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁵

Azmi mendefinisikan kebijakan dengan rekayasa social yang memiliki dampak yang luas bagi kehidupan.⁶ Di samping itu, istilah tersebut lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah atau perilaku negara pada umumnya. Dalam sistem pemerintahan kebijakan mengarah pada pengambilan keputusan. Kebijakan atau kebijaksanaan di dalam peraturan pemerintah maupun dalam kehidupan sehari-hari pasti sering didengar dan dilaksanakan. Selama ini banyak orang yang mengira bahwa kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti yang sama, atau bahkan ketika melaksanakan suatu kebijakan orang mengatakan bahwa itu adalah kebijaksanaan. Untuk itu perlu dipertegas tentang perbedaan antar kedua pengertian kebijakan dan kebijaksanaan.

Kebijakan adalah kepandaian, kemandirian, kebijaksanaan dan rangkaian konsep awal yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang Pemerintah, Organisasi dan sebagainya) prasyarat cita-cita, tujuan atau maksud dengan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.⁷

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga

⁵Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 4.

⁶ Fachruddin Azmi, *Kebijakan Pendidikan Islam Memberdayakan Peradaban*, (Medan: Manhaji, 2016), h.4

⁷Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 149.

yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Setelah memahami pengertian tentang kebijakan seperti yang diuraikan di atas, maka selanjutnya adalah menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik berbeda dengan kebijakan private/swasta. Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik, namun demikian banyak pakar merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan, karena sifat dari pada kebijakan publik yang luas.

Menurut kamus Administrasi publik dari Chandler dan Plano yang dikutip oleh Keban mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.⁸ Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye yang dikutip oleh Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

- 1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
- 2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.⁹

Selanjutnya Richard Rose yang dikutip oleh Winarno mengemukakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.¹⁰

Pengertian kebijakan publik yang lain adalah dari James E. Anderson yang dikutip oleh Wahab yang menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang

⁸ Yeremias Keban T, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, h. 56

⁹ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 16

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, h. 5

dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :

- 1) Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
- 2) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
- 3) Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
- 4) Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan.¹¹

Sementara itu, Carl I. Friedrich yang dikutip oleh Winarno menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich menyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.¹²

Terakhir, penjelasan tentang kebijakan publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau seperangkat keputusan keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan, yang mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya. Kebijakan publik dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan negara. Dari sudut penyelenggara pemerintahan negara, kebijakan publik berlangsung pada seluruh tatanan organisasi

¹¹*Ibid.*, h. 10

¹²Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002), h. 16

pemerintahan negara yang terentang di seluruh wilayah negara dan berhadapan dengan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa.

Dari berbagai pendapat para pakar tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur, baik dilakukan sendiri oleh pemerintah atau melibatkan masyarakat, yang dilakukan dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut maka kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik dalam rangka pemberian penghargaan kepada guru. Penghargaan tersebut bersifat materi berupa peningkatan insentif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Kamus Webster dalam Solichin Abdul Wahab pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden).¹³

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Kebijakan terkait juga dengan proses pembuatan kebijakan. Dunn mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas

¹³Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, h. 64.

intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut aturan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.¹⁴

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.¹⁵

Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha

¹⁴William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000), h. 22.

¹⁵Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, h. 102.

untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁶

Implementasi kebijakan berkaitan dengan proses dimana setelah masalah publik masuk dalam agenda kebijakan maka berbagai opsi dirancang untuk mengatasinya. Selanjutnya pemerintah membuat beberapa pilihan kebijakan dan menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa dari cara untuk mengimplementasikan adalah dengan proses *top-down* yaitu proses yang menekankan bagaimana mengimplementasikan kebijakan secara efektif dari pembuat kebijakan ke sasaran. Cara yang kedua menggunakan pendekatan *bottom-up* yaitu implementasi kebijakan berdasarkan perspektif sasaran kebijakan.

Nugroho menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu :

- 1) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program
- 2) Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.¹⁷

3. Faktor-faktor Mempengaruhi Kebijakan.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan diterapkan atau aplikasi rencana dalam praktek. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan

¹⁶Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, h. 65.

¹⁷Ryant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta : Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003), h. 158.

profesionalisme guru dan taraf hidup guru yang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Terdapat empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Faktor yang keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak, memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.¹⁸

¹⁸ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, h. 125.

Senada dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edwards III, menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumberdaya
- 3) Komunikasi antar organisasi
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- 6) Disposisi.¹⁹

Dari dua model implementasi di atas maka dapat disimpulkan ada lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, kecenderungan/disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial dan ekonomi.

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi adalah komunikasi. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Tiga hal penting dalam komunikasi adalah :

- a. Transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan dan kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan.
- b. Konsistensi. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Bila perintah bertentangan maka akan menyulitkan para pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
- c. Kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

¹⁹ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, h. 99.

Faktor yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup:

- a. Staf. Dalam implementasi kebijakan harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.
- b. Informasi. Informasi ini harus relevan dan memadai tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.
- c. Wewenang. Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.
- d. Fasilitas. Selanjutnya adalah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Faktor ketiga adalah disposisi implementor. Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal yang penting dalam disposisi implementor antara lain sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif.

Faktor keempat adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena

ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan.

Faktor yang kelima adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini meliputi lingkungan sosial dan ekonomi. Faktor ini mencakup kondisi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu tetapi gagal diimplementasikan di daerah lain karena tergantung sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, apakah kondisi ekonomi masyarakat mendukung kebijakan dan lain sebagainya.

B. Kompetensi Guru

1. Pengertian Kompetensi

Musfah mengemukakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketiga aspek kemampuan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kondisi fisik dan mental serta spritual seseorang besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja seseorang, maka tiga aspek ini harus dijaga pula sesuai standar yang disepakati.²⁰

Menurut Sedarmayanti bahwa kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya kompeten, berarti cakap, mampu atau terampil. Padan konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu pada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaan.²¹

Selanjutnya Purba mengemukakan kompetensi merupakan kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan

²⁰Musfah, *Kompetensi Guru* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 29.

²¹Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung : Refika ditama, 2011), h. 126.

kemampuan yang dimiliki.²² Sagala juga mengemukakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.²³

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi guru yang efektif dan peningkatan kinerja guru secara nasional diperlukan pemetaan kompetensi guru yang diperoleh melalui uji kompetensi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan tujuan dari uji kompetensi guru ini untuk pemetaan kompetensi dasar untuk pengembangan keprofesian guru, dan juga bagian dari penilaian kinerja guru. Hal ini dilakukan oleh karena pemerintah selama ini pemerintah maupun pemerintah daerah tidak punya ukuran yang dapat dijadikan acuan pemetaan untuk pengembangan kapasitas guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kompetensi juga berkaitan dengan kapasitas yang ada dalam diri seseorang untuk mampu memenuhi suatu persyaratan dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan tertentu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Usman yaitu kompetensi guru (*teacher competency*) *the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately*. Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.²⁴

Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

²²Sukarman Purba, *Kinerja Ketua Jurusan Di Perguruan Tinggi, Teori, Konsep dan Korelatnya* (Yogyakarta: Presindo, 2009), 61.

²³Saiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 112.

²⁴Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung : Rosdakarya, 2010), h. 98.

Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seorang guru yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Untuk itu semakin jelaslah, bahwa kompetensi guru harus didukung oleh pengetahuan, sikap, dan apresiasi. Itu artinya bahwa seorang guru paling tidak harus mencerminkan dua kekayaan, yaitu kepemilikan terhadap alat pendidikan, dan penguasaan terhadap alat pembelajaran.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut merupakan pengekspresian seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki seorang guru serta menuntut adanya kepemilikan yang penuh dan menyeluruh. Dengan demikian, munculnya kinerja seseorang merupakan akibat dari adanya tugas atau pekerjaan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan profesi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Alquran Surah al-Taubah (9) ayat 105 semua manusia dituntut untuk melakukan kerja yang baik, memiliki nilai guna dan bermanfaat dengan konsep amal salih, karena setiap pekerjaan yang dilakukan mendapat perhatian dari Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman.

وَسَارِعُونَ إِلَىٰ الْعَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
فَيَرْجِعُهُمْ فِي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.."*²⁵

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Islam menyuruh berusaha secara halal dengan sekuat tenaga bagi setiap manusia. Islam tidak membernarkan perilaku bermalas-malas atau berpangku tangan saja. Islam memperbolehkan dalam pemilikan harta kekayaan sesuai dengan hasil usaha yang sudah dilakukan oleh setiap pribadi.

Sedangkan dalam perspektif alquran, profesionalisme mutlak harus dimiliki oleh setiap guru sebagai pendidik, dan ketiadmenyuruaannya akan menimbulkan konsekuensi yang sangat fatal. Seandainya seorang guru tidak profesional, maka kemungkinan besar ia tidak hanya salah menyampaikan informasi tetapi juga akan

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2005), h. 428.

melahirkan generasi-generasi yang salah. Demikianlah seterusnya apabila peserta didik tersebut menjadi pendidik pula pada masanya, maka akan melakukan kesalahan yang serupa dengan kualitas yang semakin bertambah banyak.

Sehubungan dengan ini Allah Swt, dengan tegas telah membedakan antara orang yang profesional dengan orang yang kurang atau tidak profesional. Guru yang profesional akan menerima derajat (kesuksesan) yang lebih baik dan tinggi dibandingkan dengan orang yang kurang atau tidak profesional. Ayat-ayat Alquran yang menjelaskan hal ini antara lain, yaitu sebagai berikut Surah Az-Zumar ayat 9, yaitu sebagai berikut :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ۖ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.*²⁶

Kata ya'lamūn pada ayat di atas, sebahagian ulama memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu, pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Hanya saja jika makna ini yang dipilih, maka harus digaris bawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat, yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu, lalu menyesuaikan diri dan amalannya sesuai dengan pengetahuan itu.²⁷

Selanjutnya dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11, yaitu sebagai berikut :

وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَعَّجُوا فِي الْمَجَالِسِ فَانْفِسُوا يَنْفَسِحَ اللَّهُ لَكُمْ
عَمَلُونَ خَيْرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 747.

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* (Tangerang : Lentera Hati, 2008), h. 197.

Artinya : *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan..*²⁸

Ayat di atas tidak menyebutkan secara tegas bahwa Allah Swt. akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dari sekedar beriman. Tidak disebutkannya kata meninggikan itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, dan bukan faktor di luar ilmu itu.²⁹

Ayat di atas juga menegaskan tentang membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yaitu: pertama, sekedar beriman dan beramal saleh. Kedua, beriman dan beramal saleh, serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan atau tulisan maupun dengan keteladanan. Ilmu yang dimaksud oleh ayat di atas bukan saja ilmu agama, tetapi ilmu apapun yang bermanfaat.³⁰

Ayat di atas menjadi inspirasi bagi guru dalam melaksanakan tugasnya dan memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok adalah beraktivitas dengan keimanan yang benar, sehingga dengan aktivitas yang didasarkan pada niat yang baik dan keimanan yang benar, mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Swt.

Senada dengan ayat di atas, Rasul saw. menjelaskan tentang motivasi amal yang bernilai sesuai dengan apa yang diniatkan, sebagaimana hadis berikut:

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال

²⁸Ibid., h. 910.

²⁹Ibid., 71.

³⁰Ibid., h. 79.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما و الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

Artinya : *Hadis Humaidi Abdullah ibn Zubair, katanya hadis Sufyan, katanya hadis Yahya ibn Sa'id al-Anshari, katanya Muhammad ibn Ibrahim at-Taimy memberitakan padanya, bahwa ia mendengar 'Alqamah ibn Waqqas al-Laisi berkata ia mendengar Umar ibn Khattab r.a berbicara di atas mimbar, katanya Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Segala perbuatan hanya bergantung pada niat. Setiap orang hanya memperoleh sesuai dengan niatnya. Maka siapa yang hijrah karena Allah dan RasulNya maka hijrahnya diterima Allah dan RasulNya. Dan yang berhijrah karena dunia atau perempuan yang akan dinikahi, maka hasil hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya.*³¹

2. Karakteristik Kompetensi Guru

Syah menyatakan bahwa setiap calon guru dan guru profesional sangat diharapkan memahami karakteristik (ciri khas) kepribadian dirinya yang diperlukan sebagai panutan para siswanya. Secara konstitusional, guru/pendidik pada setiap jenjang pendidikan formal wajib memiliki satuan kualifikasi (keahlian yang diperlukan) dan sertifikasi (baca kewenangan mengajar) yang dihasilkan oleh peruruan tinggi yang terakreditasi (Pasal 42 ayat 1 dan 2 UU Sisdiknas 2003). Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi : 1) fleksibilitas kognitif, 2) keterbukaan psikologis.³²

Selanjutnya Purba mengemukakan bahwa ada lima karakteristik utama dari kompetensi yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja individu yaitu : motif (*motives*), watak (*traits*), konsep diri (*self concept*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*). Kelima sumber atau akarakteristik tersbut saling berinteraksi dan bersinergi untuk membentuk kompetensi individu.³³

³¹Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, cet. 1 (Beirut: Dar ash-Sha'bu, t.t), h. 79.

³²Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 225.

³³Sukarman Purba, *Kinerja Ketua Jurusan Di Perguruan Tinggi, Teori, Konsep dan Korelatnya*, h. 62.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dipahami terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut (1) motif, adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu, (2) sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur, (3) konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang, (4) pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks, dan (5) keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

Karakter atau watak atau kepribadian kompeten antara lain sebagai berikut (1) keingintahuan (*curiosity*), orang kompeten selalu ingin tahu sesuatu yang belum diketahuinya, ia sadar bahwa "saya tahu bahwa saya tidak banyak tahu", (2) keras hati (*persistence*), orang kompeten memiliki hati yang keras, artinya memiliki pendirian teguh atau memiliki ideologi yang kuat, (3) konstruktif (*constructive*), orang kompeten selalu ingin menjebol sesuatu yang sudah usang dan membangun yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, (4) kerjasama (*cooperative*), orang kompeten bersedia bekerja sama dengan orang lain. Ia sadar bahwa ia bagian dari sistem organisasi atau sistem sosial, dan ia sadar bahwa tanpa bantuan orang lain ia tidak dapat bekerja efektif, efisien, produktif, dan tidak mencapai tujuan, dan (5) jujur, orang kompeten selalu "satu kata satu perbuatan" atau berbicara berdasar fakta, dengan memiliki sifat jujur, orang kompeten dihargai dan dihormati orang lain.

3. Kategori Kompetensi Guru

Menurut Sedarmayanti menyatakan bahwa berdasarkan penelitian dengan sampel 20 negara, maka jenis pekerjaan dan industri ditentukan 18 kompetensi bersifat "generik" yang umum ditemui pada berbagai bidang pekerjaan dan industri,

a) *Achievement Orientation* (orientasi pencapaian)

- b) *Analytical Thinking* (berpikir analitis)
- c) *Conceptual Thinking* (berpikir konseptual)
- d) *Customer Service Orientation* (orientasi layanan pelanggan)
- e) *Developing Others* (mengembangkan lainnya)
- f) *Directiveness* (penginstruksian)
- g) *Flexibility* (fleksibilitas)
- h) *Impact and Influence* (dampak dan pengaruh)
- i) *Information Seeking* (pencarian informasi)
- j) *Initiative* (inisiatif)
- k) *Integrity* (Integritas)
- l) *Interpersonal Understanding* (pemahaman antar pribadi)
- m) *Organizational Awareness* (kesadaran organisasional)
- n) *Organizational Commitment* (komitmen organisasional)
- o) *Relationship Building* (menjalin hubungan)
- p) *Self Confidence* (rasa percaya diri)
- q) *Team Leadership* (kepemimpinan dalam kelompok)
- r) *Teamwork and Cooperation* (kerjasama dan kelompok kerja).³⁴

Model kompetensi menjelaskan perilaku-perilaku yang terpenting yang diperlukan untuk kinerja unggul dalam posisi, peran atau fungsi yang spesifik, yang bisa terdiri dari beberapa atau berbagai kompetensi. Model kompetensi untuk kepemimpinan dan koordinator pada dasarnya sama dan meliputi: komitmen pada pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, berpikir konseptual, pengambilan keputusan, mengembangkan orang lain, standar profesionalisme tinggi, dampak dan pengaruh, inovasi, kepemimpinan, kepedulian organisasi, orientasi pada kinerja, orientasi pada pelayanan, strategi bisnis, kerja sama tim, dan keberagaman.

Model kompetensi untuk *experts dan support* pada dasarnya juga sama dan meliputi komitmen atas pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, peduli atas ketepatan dan hal-hal detail, berpikir kreatif dan inovatif, fleksibilitas, standar profesionalisme tinggi, perencanaan, pengorganisasian dan

³⁴Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung : Refika Aditama, 2001), h. 127

koordinasi, pemecahan masalah, orientasi pada kinerja, orientasi pada pelayanan, kerja sama tim dan keberagaman.

Kompetensi menurut posisi dan menurut tingkat dan fungsi kerja sedangkan tingkat dan fungsi kerja dibedakan lagi antara superior dan bukan superior serta antara mitra dan superior. Kompetensi menurut posisinya dapat berupa kepemimpinan kependidikan, manajemen sekolah, dan pelibatan masyarakat, kepemimpinan visioner dan manajemen perubahan, penentuan prioritas, perencanaan dan pengorganisasian, komunikasi, memengaruhi dan memotivasi, sensitivitas antarpribadi dan orientasi pada hasil. Kompetensi menurut tingkat dan fungsi kerja yang membedakan antara superior dan yang bukan superior meliputi kompetensi yang berkenaan dengan memengaruhi, mengembangkan orang lain, kerja sama, mengelola kinerja, orientasi pada hasil, perbaikan berkelanjutan, berkembangnya inisiatif, membangun fokus dan kepedulian pada kualitas.

Kompetensi menurut tingkat dan fungsi kerja yang membedakan antara mitra dan superior, meliputi kompetensi yang berkenaan dengan orientasi pada kewirausahaan, berpikir konseptual, inovasi, berpikir analitis, kualitas keputusan, orientasi pada pelayanan dan komunikasi.

Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut. Ada beberapa tipe kompetensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut (1) *planning competency*, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai risiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan, (2) *influence competency*, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional. Kedua tipe kompetensi ini melibatkan aspek yang berbeda dari perilaku manusia. Kompetensi secara tradisional dikaitkan dengan kinerja yang sukses, (3) *communication competency*, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal, (4) *interpersonal competency*, meliputi empati, membangun konsensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi team player, (5) *thinking competency*, berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analitis, berkomitmen terhadap

tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif, (6) *organizational competency*, meliputi kemampuan merencanakan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan dilakukan, mengukur kemajuan, dan mengambil resiko yang diperhitungkan, dan (7) *human resource management competency*, merupakan kemampuan dalam bidang team building, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keyakinan dan Nilai-nilai yaitu keyakinan terhadap diri maupun terhadap orang lain akan sangat memengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu
- 2) Keterampilan yaitu keterampilan memainkan peranan di berbagai kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik
- 3) Pengalaman yaitu keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan tersebut
- 4) Karakteristik kepribadian yaitu dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya
- 5) Motivasi yaitu merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan.

- 6) Isu Emosional yaitu hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer. Orang mungkin mengalami kesulitan mendengarkan orang lain apabila mereka tidak merasa didengar.
- 7) Kemampuan Intelektual yaitu kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Tidak mungkin memperbaiki melalui setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi. Sudah tentu faktor seperti pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi ini
- 8) Budaya Organisasi yaitu memengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a) Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan mempertimbangkan siapa di antara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahliannya tentang kompetensi.
 - b) Semua penghargaan mengomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.
 - c) Praktik pengambilan keputusan memengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
 - d) Filosofi organisasi-misi, visi dan nia-nilai berhubungan dengan semua kompetensi.
 - e) Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.
 - f) Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung memengaruhi kompetensi kepemimpinan.

4. Konsep Kompetensi Guru

Seorang pendidik, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 28 harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Ayat 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Hanafiah mengemukakan bahwa guru sebagai otonomi kelas memiliki wewenang untuk melakukan reformasi kelas (*classroom reform*) dalam rangka melakukan perubahan perilaku peserta didik secara berkelanjutan yang sejalan dengan tugas perkembangannya dan tuntutan lingkungan disekitarnya. Guru sebagai arsitek perubahan perilaku peserta didik dan sekaligus sebagai model panutan para peserta didik dituntut memiliki kompetensi yang paripurna.³⁵

Menurut Uno bahwa guru dapat melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan hasilnya untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, guru tidak hanya bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar.³⁶

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru.

Guru adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Guru dengan segala kemampuannya dan daya upayanya mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didiknya. Sehingga tidak salah jika kita menempatkan guru sebagai salah satu kunci

³⁵Nanang Hanafiah, *Konsep Strategi Pembelajaran* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 103

³⁶Hamzah B. Uno, *Menjadi Peneliti PTK yang Profesional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 16.

pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju dimasa yang akan datang. Dapat dibayangkan jika guru tidak menempatkan fungsi sebagaimana mestinya, bangsa dan negara ini akan tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian waktu tidak terbendung lagi perkembangannya. Seorang guru yang mendidik banyak siswa dan siswi di sekolah harus memiliki kompetensi.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008 tersebut, adalah kompetensi guru sebagaimana meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Guru harus memiliki kompetensi-kompetensi pendidik, yang menyangkut kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi professional. Keempat kompetensi tersebut dianalisis dan diturunkan berdasarkan hakikat guru yaitu: gagasan, utama, rasa, dan upaya. Gagasan identik dengan kompetensi professional; utama identik dengan kompetensi sosial; rasa identik dengan kompetensi kepribadian, dan upaya identik dengan kompetensi pedagogik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kompetensi yang harus dimiliki pendidik adalah kompetensi sebagai agen pembelajaran, yakni kemampuan pendidik untuk berperan sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Kompetensi ini terdiri atas (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi professional dan (d) kompetensi sosial. Selanjutnya masing-masing kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru harus mampu mengoptimalkan

potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran.

Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru seperti diamanatkan dalam Peraturan pemerintah diatas adalah kompetensi pedagogic. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini adalah kompetensi pengelolaan pembelajaran yang dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.

(a) Merencanakan program belajar mengajar

Proses belajar mengajar perlu direncanakan agar dalam pelaksanaannya pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan pemikiran tentang apa yang akan dilakukan. Perencanaan program belajar mengajar memperkirakan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu melaksanakan pembelajaran. Isi perencanaan yaitu mengatur dan menetapkan unsur-unsur pembelajaran, seperti tujuan, bahan atau isi, metode, alat dan sumber, serta penilaian.

Program belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terperinci dijelaskan kemana siswa itu akan dibawa (tujuan), apa yang harus dipelajari (isi bahan pelajaran), bagaimana siswa mempelajarinya (metode dan teknik), dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian).

Adapun unsur-unsur utama yang harus ada dalam perencanaan pengajaran, yaitu: (1) tujuan yang hendak dicapai, berupa bentuk-bentuk tingkah laku apa yang diinginkan untuk dimiliki siswa setelah terjadinya proses belajar mengajar, (2) bahan pelajaran atau isi pelajaran yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan, (3) metode dan teknik yang digunakan, yaitu bagaimana proses belajar mengajar yang akan diciptakan guru agar siswa mencapai tujuan, dan (4) penilaian, yakni bagaimana menciptakan dan menggunakan alat untuk mengetahui tujuan tercapai atau tidak.

Kegiatan merencanakan program belajar mengajar menurut pola Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) meliputi: (1) merumuskan tujuan intruksional, (2) menguraikan deskripsi satuan bahasan, (3) merancang kegiatan belajar mengajar, (4) memilih berbagai media dan sumber belajar, dan (5) menyusun instrumen untuk nilai penguasaan tujuan.

Kemampuan guru dalam melakukan perencanaan atau merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan: (1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, (2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, (3) merencanakan pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan (5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.

Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program belajar mengajar merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup merumuskan tujuan, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan.

(b) Melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar

Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah disusun. Dalam kegiatan ini kemampuan yang di tuntut adalah keaktifan guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah metodenya diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang, manakala siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Pada tahap ini disamping pengetahuan teori belajar mengajar, pengetahuan tentang siswa, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik belajar, misalnya: prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar siswa.

Persyaratan kemampuan yang harus di miliki guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi kemampuan: (1) menggunakan metode belajar, media pelajaran, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pelajaran, (2) mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan pengajaran, (3)

berkomunikasi dengan siswa, (4) mendemonstrasikan berbagai metode mengajar, dan (5) melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menyangkut pengelolaan pembelajaran, dalam menyampaikan materi pelajaran harus dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga tujuan pengajaran dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar terlihat dalam mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal siswa, kemudian mendiagnosis, menilai dan merespon setiap perubahan perilaku siswa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses belajar mengajar merupakan sesuatu kegiatan dimana berlangsung hubungan antara manusia, dengan tujuan membantu perkembangan dan menolong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya melaksanakan proses belajar mengajar adalah menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur kognitif para siswa.

(c) Melakukan penilaian

Penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan dilaksanakan. Penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebarkan pemahaman dan perbaikan pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan.

Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian, melaksanakan penilaian proses belajar mengajar merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa.

Menurut penjabaran PP Nomor 74 Tahun 2008, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

(2) Kompetensi Kepribadian

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk Tuhan, seorang guru wajib menguasai pengetahuan yang akan diajarkannya kepada peserta didik secara benar dan bertanggung jawab, ia harus memiliki pengetahuan penunjang tentang kondisi fisiologis, psikologis, dan pedagogis dari para peserta didik yang dihadapinya. Selain itu, Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat.

Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, berhubungan dengan perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian peserta didik yang kuat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan peserta didiknya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemandirian dan integritas kepribadian seorang guru.

(3) Kompetensi Sosial

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk etis, seorang guru dapat memperlakukan peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Ia harus memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut. Instruktur hanya bertugas melayani mereka sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Kompetensi sosial yang dimiliki seorang guru

adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka (seperti orang tua, tetangga, dan sesama teman).

Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan.

(4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-*update*, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan.

Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus.

Keaktifan peserta didik harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong peserta didik untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Karena itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai konteks materinya.

Guru harus memperhatikan prinsip-prinsip melaksanakan pembelajaran, misalnya, bagaimana menerapkan prinsip apersepsi, perhatian, kerja kelompok, dan prinsip-prinsip lainnya. Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus

dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat menyusun butir soal secara benar, agar tes yang digunakan dapat memotivasi peserta didik belajar.

Guru sebagai pendidik ataupun sebagai pengajar merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan di sekolah. Tugas guru yang utama adalah memberikan pengetahuan (*cognitive*), sikap/nilai (*affective*), dan keterampilan (*psychomotor*) kepada anak didik. Tugas guru di lapangan pengajaran berperanan juga sebagai pembimbing proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian tugas dan peranan guru adalah mengajar dan mendidik. Berkaitan dengan hal tersebut guru harus memiliki inovasi tinggi.

Aktivitas atau kinerja guru sangat terkait dengan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Tugas dan tanggung jawab guru adalah sebagai pengajar, pembimbing dan administrator. Selain itu tugas dan tanggung jawab guru mencakup bidang pengajaran, bimbingan, pembinaan hubungan dengan masyarakat, pengembangan kurikulum, dan pengembangan profesi.

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengertian sederhana kepribadian berarti sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan dirinya dari yang lain.

Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Dalam kaitan ini kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah). Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis.

Fleksibilitas kognitif atau keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya

keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur dalam pengamatan dan pengenalan.

Faktor lain turut menentukan tugas seorang guru adalah keterbukaan psikologis guru itu sendiri. Keterbukaan ini merupakan dasar kompetensi profesional keguruan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Ditinjau dari sudut fungsi dan signifikansinya, keterbukaan psikologis merupakan karakteristik kepribadian yang penting bagi guru dalam hubungannya sebagai direktur belajar selain sebagai panutan siswanya. Oleh karena itu, hanya guru yang memiliki keterbukaan psikologis yang benar-benar dapat diharapkan berhasil dalam mengelola proses belajar mengajar.

Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. Guru sebagai pemegang kunci sangat menentukan proses keberhasilan siswa. Guru harus melaksanakan perilaku-perilaku mengenai kejelasan dalam menyampaikan informasi secara verbal maupun non verbal. Berdasarkan uraian di atas, konsep kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan dasar melaksanakan tugas keguruan yang dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan menilai proses belajar mengajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Kemampuan itu meliputi: (a) menguasai bahan ajar, b) mengelola program belajar mengajar, c) mengelola kelas, d) menggunakan media/sumber, e) menguasai landasan-landasan kependidikan, f) mengelola interaksi belajar mengajar, g) menilai prestasi siswa untuk pendidikan dan pengajaran, h) mengenal fungsi dan program layanan bimbingan serta penyuluhan, i) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, j) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

C. Pesantren

1. Pengertian Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai sejarah panjang dan unik. Secara historis, pesantren termasuk pendidikan Islam yang paling awal dan masih bertahan sampai sekarang. Berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang muncul kemudian, pesantren telah sangat berjasa dalam mencetak kader-kader ulama, dan kemudian berperan aktif dalam penyebaran agama Islam dan transfer ilmu pengetahuan. Namun, dalam perkembangannya pesantren telah mengalami transformasi yang memungkinkannya kehilangan identitas jika nilai-nilai tradisionalnya tidak dilestarikan. Sesuatu yang unik pada dunia pesantren ialah begitu banyak variasi antara satu pesantren dengan pesantren lainnya. Namun dalam berbagai aspek juga ditemukan kesamaan-kesamaan umum seperti bentuk kepemimpinan, organisasi pengurus, dewan kiai atau dewan guru, susunan rencana pelajaran, kelompok santri, dan bagian-bagian yang lain.³⁷

Kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntunan umat. Karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidika selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya sehingga keberadaanya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Dalam waktu yang sama segala aktivitasnya pun mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat sekitarnya. Karena keunikannya itu maka pesantren hadir dalam berbagai situasi dan kondisi dan hampir dapat dipastikan bahwa lembaga ini meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana dan karakteristik yang beragam tidak pernah mati.

Demikian seluruh komponen di dalamnya seperti kyai atau ustad serta para santri senantiasa mengabdikan diri mereka demi kelangsungan pesantren. Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-Islaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Sebab, lembaga serupa pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa Hindu Budha.³⁸ Pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari asalnya. Hal ini merupakan tempat tinggal kyai bersama santrinya dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada awal pertumbuhan dan perkembangannya, pondok

³⁷Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S, 1982), h. 34.

³⁸Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesanten, Sebuah Potret Perjalanan*. Cet.I, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 28.

bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama. Para santri untuk mengikuti dengan baik pelajaran yang diberikan oleh kyai melainkan juga sebagai tempat training atau latihan bagi santri agar mampu hidup mandiri dalam masyarakat.

Hubungan kyai dan santri pada umumnya merupakan hubungan ketaatan tanpa batas, begitu pula kepada guru-guru bantu.³⁹ Rasa persamaan dan persaudaraan sangat terasa. Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan awalan *pe* dan akhiran *an* yang menunjukkan tempat. Dengan demikian pesantren artinya “tempat para santri”. Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata *sant* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat berarti “tempat pendidikan manusia baik-baik”.⁴⁰

Lebih jelas lagi Nurcholish mengupas asal usul perkataan santri, dan juga tentang kyai karena kedua perkataan tersebut tidak dapat dipisahkan ketika dibicarakan tentang pesantren. Ia berpendapat: “santri asal kata *sastrei* (sangsekerta) yang berarti melek huruf, dikonotasikan santri adalah kelas literary, pengetahuan agama dibaca dari kitab berbahasa Arab dan diasumsikan bahwa santri berarti juga orang yang tau tentang agama (melalui kitab-kitab). Dan paling tidak santri dapat membaca Alquran, sehingga membawa kepada sikap lebih serius dalam memandang agama. Perkataan santri juga berasal dari bahasa Jawa (cantrik) yang berarti orang yang selalu mengikuti seorang guru kemanapun belajra dari guru mengenai sesuatu keahlian.”⁴¹

Sedangkan menurut Zamakhsyari Dhofier, Pesantren sendiri pada dasarnya pesantren adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Disamping itu, kata pondok mungkin berasal dari bahasa Arab “Funduq” yang berarti “hotel atau asrama”.⁴² Perkataan kyai (laki-laki), dan nyai (wanita) mempunyai arti orang tua, kedua arti tersebut terkandung rasa pensucian pada yang tua, sehingga kyai tidak saja berarti yang tua, tetapi juga yang berarti sakral, keramat, dan sakti. Dilihat dari sudut

³⁹Karel A.Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah* lih. Wahjoetomo Dalam Buku Terjemahannya. Cet.II, (Jakarta: LP3S, 1994), h. 20.

⁴⁰Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesanten*.Cet.II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 21.

⁴¹Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesanten, Sebuah Potret Perjalanan*, h. 30.

⁴²Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 18.

keberadaan pesantren berbeda dengan pendapat dari kalangan peneliti. Sementara ada yang berpendapat pada umumnya berdirinya suatu pesantren diawali dari pengakuan masyarakat keunggulan dan ketinggalan ilmu seorang guru atau kyai. Karena keinginan menuntut dan memperoleh ilmu dari kyai atau guru tersebut maka masyarakat sekitar bahkan dari luar daerah datang kepadanya untuk belajar. Mereka lalu membangun tempat tinggal yang sederhana disekitar tempat tinggal guru atau kyai tersebut.⁴³

Tidak jelas dan tidak banyak referensi yang menjelaskan kapan pesantren pertama berdiri. Pada awal rintisannya, pesantren bukan hanya menekankan misi pendidikan, melainkan juga dakwah, justru Lembaga pendidikan ini pada awalnya selalu mencari lokasi yang dapat menyalurkan dakwah, sehingga berbenturan antara nilai-nilai yang dibawanya dengan nilai-nilai yang telah mengakar di masyarakat setempat. Sehingga menghadapi kerawanan-kerawanan sosial dan keagamaan pada awal perjuangannya. Terkadang pesantren juga menghadapi penyerangan penguasa yang merasa tersaingi kewibawaannya. Sebagai contoh, Raden Paku (Sunan Giri) sewaktu merintis pondok pesantren di kedaton pernah terancam rencana pembunuhan atas perintah raja Majapahit (Prabu Brawijaya).⁴⁴

Pesantren tidak pernah memulai konfrontasi sebab orientasi utamanya adalah melaksanakan dakwah dan menanamkan pendidikan. Pada tahap berikutnya, pesantren diterima masyarakat sebagai upaya mencerdaskan bangsa. Dan menjadi kebanggaan masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang muslim. Kemudian selanjutnya, dimasa kolonial Belanda yang menguasai Indonesia selama 3,5 abad lamanya, selain menguasai politik, ekonomi, dan militer juga mengemban misi penyebaran agama Kristen. Bagi Belanda, pesantren merupakan lembaga yang anti terhadap gerakan kristenisasi dan upaya pembodohan masyarakat. Anggapan ini ialah argumen bagi belanda untuk menekan pertumbuhan pesantren. Hadimulyo menuturkan bahwa penjajah malah menghalang-halangi perkembangan agama Islam sehingga pondok pesantren tidak dapat berkembang secara normal.⁴⁵ Bahkan pada 1882 Belanda membentuk “*Pristeranden*” yang bertugas mengawasi pengajaran

⁴³Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet.I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996), h. 138.

⁴⁴*Ibid.*, h. 139.

⁴⁵ Hadimulyo, *Dua Pesantren Dua Wajah Budaya: Dalam Rahardjo (ed), Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*, Cet.I, (Jakarta:P3M, 1985), h. 110.

agama di pesantren-pesantren. Kemudian pada awal penjajahan Jepang, pesantren berkonfrontasi dengan imperialisme baru, ini disebabkan karena penolakan Kyai Hasyim Asy'ari, dan kyai-kyai pesantren lainnya terhadap *saikere* (penghormatan terhadap Kaisar Jepang Tenno Haika sebagai keturunan dewa Amaterasu) dengan cara membungkukan badan 90 derajat menghadap Tokyo setiap pagi pukul 07.00, sehingga mereka ditangkap dan dipenjara Jepang.

Wahjoetomo mengatakan bahwa pesantren yang berdiri ditanah air, khususnya di Jawa dimulai dan dibawa oleh wali songo, sehingga mungkin juga dapat dikatakan pesantren yang pertama didirikan adalah "Pondok Pesantren yang pertama didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau terkenal sebutan Sunan Gresik. (wafat tanggal 12 Rabiul Awal 882 H atau tanggal 8 April 1419 di Gresik).⁴⁶

2. Tujuan Pesantren

Pesantren mempunyai tujuan keagamaan, sesuai dengan pribadi dari kyai sendiri. Kebiasaan mendirikan lembaga pendidikan pesantren dipengaruhi oleh pengalaman pribadi kyai semasa belajar di pesantren. Tujuan pendidikan di pesantren sarat dengan muatan-muatan keagamaan, bahkan seorang kyai pernah menjelaskan bahwa berdirinya pesantren adalah sebagai amal ibadah untuk kehidupan akhirat.⁴⁷

Tujuan-tujuan pendidikan di pesantren yang tidak dirumuskan secara tertulis dalam sebuah buku atau papan statistik tersebut dimaksudkan sebagai upaya secara diam-diam untuk menghindari sikap ria, yaitu memamerkan perbuatan-perbuatan baik. Secara psikologis, kyai memiliki keyakinan keagamaan, bahwa perbuatan baik yang sering diikuti dengan sikap ria, tidak mendapatkan pahala dari Tuhan, sekalipun perbuatan itu dilakukan dengan jerih payah atas usaha sendiri.⁴⁸

Tujuan pembelajaran di pesantren lebih mengutamakan niat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat daripada mengejar hal-hal yang

⁴⁶Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiyai Kasus Pondok Tebuireng* (Malang:Kalimasahada Press, 1993), h. 79.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1989), h. 41

⁴⁸*Ibid.*, h. 141

bersifat material. Seseorang yang mengaji/mesantren disarankan agar memantapkan niatnya dan mengikuti pengajian itu semata-mata untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya.

Karena itu, di dalam setiap pengajaran di pesantren, kyai selalu mangajak para santri untuk mengawalinya dengan membaca surat al-Fâtiḥah yang ditujukan kepada pengarang kitab yang dikaji, dan selanjutnya diakhiri dengan pembacaan doa oleh kyai. Kebiasaan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pengarang kitab dan sekaligus sebagai rasa tunduk kepadanya, yaitu perbuatan yang dilakukan komunitas pesantren untuk memperoleh kebaikan atau keberkahan dari seseorang yang telah diketahui ketinggian ilmunya dan juga sifat-sifat mulia yang disandangnya.⁴⁹

Mengingat pesantren merupakan lembaga yang awal berdirinya melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya, maka tujuan pendidikan di pesantren juga tidak lepas dari harapan masyarakat. Berbagai anggota masyarakat datang ke kyai menitipkan anaknya dengan maksud supaya dididik menjadi orang baik-baik, mengerti ilmu agama, menghormati kedua orang tua dan gurunya.⁵⁰

Dalam kaitannya dengan pendidikan pesantren, maka pemahaman tujuannya hendaknya didasarkan terlebih dahulu pada tujuan hidup manusia menurut Islam. Artinya, tujuan pendidikan pesantren harus sejalan dengan tujuan hidup manusia menurut konsepsi dan nilai-nilai Islam. Maka dalam perumusannya, tujuan pendidikan pesantren yang memiliki tingkat kesamaan dengan pendidikan Islam itu seyogyanya memiliki keterpaduan, yaitu berorientasi kepada hakikat pendidikan, yang memiliki beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Tujuan hidup manusia yang berlandaskan misi keseimbangan hidup yang mengapresiasi kehidupan dunia dan akhirat. Manusia hidup bukan karena kebetulan, tanpa arah tujuan yang jelas. Ia diciptakan dengan membawa amanah dalam mengemban tugas dan tujuan hidup tertentu.
- 2) Memperhatikan tuntunan dan tatanan sosial masyarakat, baik berupa pelestarian nilai budaya, maupun pemenuhan tuntutan dan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dan tuntutan perubahan zaman, seperti

⁴⁹Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, *Dinamika Dunia Pesantren*, (Jakarta : P3M, 1988), cet. ke-1, h. 2

⁵⁰ *Ibid.*, h. 3

terciptanya masyarakat etik (etikal society) yang berkarakter pada sifat-sifat sosial yang tinggi seperti: (a) nilai religiusitas, artinya mendambakan model dan karakter masyarakat yang beretika religi, tidak sekuler; (b) nilai egalitarian, yaitu watak yang mendambakan keadilan, membarikan kesempatan luas kepada masyarakat luas kepada masyarakat untuk tumbuh maju dan berkembang bersama-sama; (c) mengindahkan nilai demokrasi dan penegakan hukum; dan (d) memberikan penghargaan terhadap manusia (human dignity), menerima dengan segala kesadaran terhadap pluralisme dan multikulturalisme dalam berbangsa.

- 3) Memperhatikan watak-watak dasar (nature) manusia seperti kecenderungan beragama (fitrah) yang mendambakan kebenaran, kebutuhan individual dan keluarga sesuai batas dan tingkat kesanggupan.⁵¹

Berdasarkan kriteria-kriteria dari tujuan dari tujuan pendidikan pesantren seperti tersebut di atas, maka tujuan pesantren terpenting adalah dari pembelajaran di pesantren harus berorientasi pada kemanfaatan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pendirian pesantren itu sendiri, seperti kyai, santri dan masyarakat sekitarnya. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran di pesantren dapat dirasakan manfaatnya bagi diri kyai dan keluarganya, para santri /pelajar, dan bagi masyarakat yang berada di sekitar pesantren.

3. Sistem Pembelajaran Pesantren

Untuk mengetahui karakteristik pendidikan pesantren, maka dapat di cari dari berbagai segi yang meliputi keseluruhan sistem pendidikan: materi pelajaran dan metode pengajaran, prinsip-prinsip pendidikan, sarana dan tujuan pendidikan pesantren, kehidupan kyai dan santri serta hubungan keduanya. Materi Pelajaran dan Metode Pengajaran sebagai lembaga pendidikan Islam, maka pesantren pada dasarnya hanya mengajarkan agama, sedangkan sumber kajian atau mata pelajarannya ialah kitab-kitab dalam bahasa Arab. Pelajara agama yang dikaji ialah Al-Qur'an dengan tajwidnya dan tafsirnya, fiqh dan usul fiqh, hadis dengan mushtalah hadis, bahasa Arab dengan ilmu alatnya seperti nahwu, Sharaf. Kitab-kitab yang dikaji di pesantren umumnya kitab-kitab yang ditulis dalam abad

⁵¹ Pupuh Fathurrahman, *Keunggulan Pendidikan Pesantren: Alternatif Sistem Pendidikan Terpadu Abad XXI*, (Bandung : Paramartha, 2000), cet. ke-1, h. 155-157

pertengahan, yaitu antara abad ke-12 sampai dengan abad ke-15 atau yang sering disebut dengan “Kitab Kuning”. Namun di saat sekarang ini banyak pesantren-pesantren yang sudah memasukan sistem pendidikan yang modern dengan sistem pendidikan yang telah ditetapkan di Indonesia, seperti pengetahuan umum yang telah di ajarkan disekolah-sekolah umum.⁵²

Umumnya, suatu pondok pesantren berawal dari adanya seorang kyai di suatu tempat, kemudian datang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Setelah semakin hari semakin banyak santri yang datang, timbullah inisiatif untuk mendirikan pondok atau asrama di samping rumah kyai. Pada zaman dahulu kyai tidak merencanakan bagaimana membangun pondoknya itu, namun yang terpikir hanyalah bagaimana mengajarkan ilmu agama supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh santri. Kyai saat itu belum memberikan perhatian terhadap tempat-tempat yang didiami oleh para santri, yang umumnya sangat kecil dan sederhana. Mereka menempati sebuah gedung atau rumah kecil yang mereka dirikan sendiri di sekitar rumah kyai. Semakin banyak jumlah santri, semakin bertambah pula gubug yang didirikan. Para santri selanjutnya memopulerkan keberadaan pondok pesantren tersebut, sehingga menjadi terkenal ke mana-mana, contohnya seperti pada pondok-pondok yang timbul pada zaman Walisongo.⁵³

Pondok Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah dimulai sejak tahun 1596. Kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Bahkan dalam catatan Howard M. Federspiel- salah seorang pengkaji keislaman di Indonesia, menjelang abad ke-12 pusat-pusat studi di Aceh (pesantren disebut dengan nama Dayah di Aceh) dan Palembang (Sumatera), di Jawa Timur dan di Gowa (Sulawesi) telah menghasilkan tulisan-tulisan penting dan telah menarik santri untuk belajar.⁵⁴

Kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh

⁵²Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiyai Kasus Pondok Tebuireng*, h. 80

⁵³ Rochidin Wahab Rochidin, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Alfabeta CV, 2004), h. 153-154.

⁵⁴Hielmy Irfan, *Wacana Islam* (Ciamis: Pusat Informasi Pesantren, 2000), h. 120.

Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. Istilah santri juga dalam ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedang C.C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata *saint* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.⁵⁵

Elemen dasar pesantren adalah Sebuah pondok yang pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya (santri) tinggal bersama di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan Kyai.⁵⁶ Dengan istilah pondok pesantren dimaksudkan sebagai suatu bentuk pendidikan keislaman yang melembaga di Indonesia. Pondok atau asrama merupakan tempat yang sudah disediakan untuk kegiatan bagi para santri. Adanya pondok ini banyak menunjang segala kegiatan yang ada. Hal ini didasarkan jarak pondok dengan sarana pondok yang lain biasanya berdekatan sehingga memudahkan untuk komunikasi antara Kyai dan santri, dan antara satu santri dengan santri yang lain.

Dengan demikian tercipta situasi yang komunikatif di samping adanya hubungan timbal balik antara Kyai dan santri, dan antara santri dengan santri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsari Dhofir, bahwa adanya sikap timbal balik antara Kyai dan santri di mana para santri menganggap Kyai seolah-olah menjadi bapaknya sendiri, sedangkan santri dianggap Kyai sebagai titipan Allah yang harus senantiasa dilindungi⁵⁷ Sikap timbal balik tersebut menimbulkan rasa kekeluargaan dan saling menyayangi satu sama lain, sehingga mudah bagi Kyai dan ustaz untuk membimbing dan mengawasi anak didiknya atau santri. Segala sesuatu yang dihadapi oleh santri dapat dimonitor langsung oleh Kyai dan ustaz, sehingga dapat membantu memberikan pemecahan ataupun pengarahan yang cepat terhadap santri, mengurai masalah yang dihadapi para santri.⁵⁸

⁵⁵Fatah, Rohadi Abdul, Taufik, M Tata, Bisri, Abdul Mukti, *Rekontruksi Pesantren Masa Depan* (Jakarta Utara: Listafariska Putra, 2005), h. 11.

⁵⁶Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S, 1982), h. 49.

⁵⁷*Ibid.*, h. 49.

⁵⁸*Ibid.*, h. 50.

Keadaan pondok pada masa kolonial sangat berbeda dengan keberadaan pondok sekarang. Hurgronje menggambarkan keadaan pondok pada masa kolonial (dalam bukunya Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai*) yaitu: “Pondok terdiri dari sebuah gedung berbentuk persegi, biasanya dibangun dari bambu, tetapi di desa-desa yang agak makmur tiangnya terdiri dari kayu dan batangnya juga terbuat dari kayu. Tangga pondok dihubungkan ke sumur oleh sederet batu-batu titian, sehingga santri yang kebanyakan tidak bersepatu itu dapat mencuci kakinya sebelum naik ke pondoknya.

Pondok yang sederhana hanya terdiri dari ruangan yang besar yang didiami bersama. Terdapat juga pondok yang agaknya sempurna di mana didapati sebuah gang (lorong) yang dihubungkan oleh pintu-pintu. Di sebelah kiri kanan gang terdapat kamar kecil-kecil dengan pintunya yang sempit, sehingga sewaktu memasuki kamar itu orang-orang terpaksa harus membungkuk, jendelanya kecil-kecil dan memakai terali. Perabot di dalamnya sangat sederhana. Di depan jendela yang kecil itu terdapat tikar pandan atau rotan dan sebuah meja pendek dari bambu atau dari kayu, di atasnya terletak beberapa buah kitab.⁵⁹”

Dewasa ini keberadaan pondok pesantren sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga komponen-komponen yang dimaksudkan makin lama makin bertambah dan dilengkapi sarana dan prasarannya. Dalam sejarah pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan, termasuk dibukanya pondok khusus perempuan. Dengan perkembangan tersebut, terdapat pondok perempuan dan pondok laki-laki. Sehingga pesantren yang tergolong besar dapat menerima santri laki-laki dan santri perempuan, dengan memisahkan pondok-pondok berdasarkan jenis kelamin dengan peraturan yang ketat.

Masjid di pondok pesantren merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik ibadah lima waktu, khotbah dan salat Jumat dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Sebagaimana pula Zamakhsyari Dhofir berpendapat bahwa: “Kedudukan masjid sebagai sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat

⁵⁹Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiyai Kasus Pondok Tebuireng*, h. 6.

di masjid sejak masjid Quba' didirikan di dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad saw tetap terpancar dalam sistem pesantren. Sejak zaman Nabi, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam".⁶⁰

Lembaga-lembaga pesantren di Jawa memelihara terus tradisi tersebut, bahkan pada zaman sekarang di daerah umat Islam begitu terpengaruh oleh kehidupan Barat, masih ditemui beberapa ulama dengan penuh pengabdian mengajar kepada para santri di masjid-masjid serta memberi wejangan dan anjuran kepada murid-muridnya. Di Jawa biasanya seorang Kyai yang mengembangkan sebuah pesantren pertama-tama dengan mendirikan masjid di dekat rumahnya. Langkah ini pun biasanya diambil atas perintah Kyainya yang telah menilai bahwa ia sanggup memimpin sebuah pesantren. Selanjutnya Kyai tersebut mengajar murid-muridnya (para santri) di masjid, sehingga masjid merupakan elemen yang sangat penting dari pesantren.

Sejak tumbuhnya pesantren, pengajaran kitab-kitab klasik diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia terhadap paham Islam tradisional. Karena itu kitab-kitab Islam klasik merupakan bagian integral dari nilai dan paham pesantren yang tidak dapat dipisahkan. Penyebutan kitab-kitab Islam klasik di dunia pesantren lebih populer dengan sebutan "kitab kuning", tetapi asal-usul istilah ini belum diketahui secara pasti. Mungkin penyebutan istilah tersebut guna membatasi dengan tahun karangan atau disebabkan warna kertas dari kitab tersebut berwarna kuning, tetapi argumentasi ini kurang tepat sebab pada saat ini kitab-kitab Islam klasik sudah banyak dicetak dengan kertas putih.

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik oleh pengasuh pondok (Kyai) atau ustaz biasanya dengan menggunakan sistem sorogan, wetonan, dan bandongan. Adapun kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren menurut Zamakhsyari Dhofir dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu: (1) Nahwu (syntax) dan Sharaf (morfologi), (2) Fiqih (hukum), (3) Ushul Fiqh (yurispundensi), (4) Hadits, (5) Tafsir, (6) Tauhid (theologi), (7) Tasawuf dan Etika, (8) Cabang-cabang lain seperti Tarikh (sejarah) dan Balaghah".⁶¹

⁶⁰ Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, h. 49.

⁶¹ *Ibid.*, h. 50.

Kitab-kitab Islam klasik adalah kepustakaan dan pegangan para Kyai di pesantren. Keberadaannya tidaklah dapat dipisahkan dengan Kyai di pesantren. Kitab-kitab Islam klasik merupakan modifikasi nilai-nilai ajaran Islam, sedangkan Kyai merupakan personifikasi dari nilai-nilai itu. Di sisi lain keharusan Kyai di samping tumbuh disebabkan kekuatan-kekuatan mistik yang juga karena kemampuannya menguasai kitab-kitab Islam klasik. Sehubungan dengan hal ini, Moh. Hasyim Munif mengatakan bahwa: “Ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab kuning tetap merupakan pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran itu diyakini bersumber pada kitab Allah Alquran dan sunnah Rasulullah (Al-Hadits), dan relevan artinya ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna kini atau nanti”⁶²

Dengan demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan hal utama di pesantren guna mencetak alumnus yang menguasai pengetahuan tentang Islam bahkan diharapkan di antaranya dapat menjadi Kyai. Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan, namun ada pula santri yang tidak tinggal di tempat yang telah disediakan tersebut yang biasa disebut dengan santri kalong sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan di depan.

Menurut Dhofir berpendapat bahwa: “Santri yaitu murid-murid yang tinggal di dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Islam klasik yang pada umumnya terdiri dari dua kelompok santri yaitu: - Santri Mukim yaitu santri atau murid-murid yang berasal dari jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren. Santri Kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang mereka tidak menetap di lingkungan kompleks pesantren tetapi setelah mengikuti pelajaran mereka pulang.”⁶³

Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka mengurus sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang sama antara santri yang satu dengan lainnya. Santri diwajibkan menaati peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut dan apabila ada pelanggaran dikenakan sanksi sesuai

⁶²Moh.Hasyim Munif, *Pondok Pesantren Sebagai Tempat Berdakwah*. Cet. I, (Bandung: Rineka Media Cipta Press, 2006), h. 78.

⁶³Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, h. 51.

dengan pelanggaran yang dilakukan. Istilah Kyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa.⁶⁴

Kata Kyai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Selain gelar Kyai diberikan kepada seorang laki-laki yang lanjut usia, arif, dan dihormati di Jawa. Gelar Kyai juga diberikan untuk benda-benda yang keramat dan dituahkan, seperti keris dan tombak. Namun demikian pengertian paling luas di Indonesia, sebutan Kyai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terhormat telah membaktikan hidupnya untuk Allah swt serta menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran serta pandangan Islam melalui pendidikan.

Kyai berkedudukan sebagai tokoh sentral dalam tata kehidupan pesantren, sekaligus sebagai pemimpin pesantren. Dalam kedudukan ini nilai kepesantrenannya banyak tergantung pada kepribadian Kyai sebagai suri teladan dan sekaligus pemegang kebijaksanaan mutlak dalam tata nilai pesantren. Dalam hal ini M. Habib Chirzin mengatakan bahwa peran kyai sangat besar sekali dalam bidang penanganan iman, bimbingan amaliyah, penyebaran dan pewarisan ilmu, pembinaan akhlak, pendidikan beramal, dan memimpin serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh santri dan masyarakat.

Dan dalam hal pemikiran kyai lebih banyak berupa terbentuknya pola berpikir, sikap, jiwa, serta orientasi tertentu untuk memimpin sesuai dengan latar belakang kepribadian kyai.⁶⁵ Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran Kyai sangat menentukan keberhasilan pesantren yang diasuhnya. Demikianlah beberapa uraian tentang elemen-elemen umum pesantren, yang pada dasarnya merupakan syarat dan gambaran kelengkapan elemen sebuah pondok pesantren yang terklasifikasi asli meskipun tidak menutup kemungkinan berkembang atau bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas vertikal (dengan

⁶⁴ *Ibid.*, h. 61.

⁶⁵ M.Habib Chirzin, *Tradisi Pesantren Masa kini* (Jakarta: Alfabeta, 1996), h. 130.

penjejalan materi-materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horisontal (kesadaran sosial).

Pesantren kini tidak lagi berkuat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (*regional-based curriculum*) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan kikian masyarakat (*society-based curriculum*). Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespons carut marut persoalan masyarakat di sekitarnya.⁶⁶

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Keberadaan Pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa.

Banyak pesantren di Indonesia hanya membebaskan para santrinya dengan biaya yang rendah, meskipun beberapa pesantren modern membebani dengan biaya yang lebih tinggi. Meski begitu, jika dibandingkan dengan beberapa institusi pendidikan lainnya yang sejenis, pesantren modern jauh lebih murah. Organisasi massa (ormas) Islam yang paling banyak memiliki pesantren adalah Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam lainnya yang juga memiliki banyak pesantren adalah Al-Washliyah dan Hidayatullah. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja umumnya disebut pesantren salaf. Pola tradisional yang diterapkan dalam pesantren salafi adalah para santri bekerja untuk kyai mereka bisa dengan mencangkul sawah, mengurus empang (kolam ikan), dan lain sebagainya dan sebagai balasannya mereka diajari ilmu agama oleh kyai mereka tersebut. sebagian besar pesantren salafi menyediakan asrama sebagai tempat tinggal para santrinya dengan membebaskan biaya yang rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali.

Para santri, pada umumnya menghabiskan hingga 20 jam waktu sehari dengan penuh dengan kegiatan, dimulai dari *salat shubuh* di waktu pagi hingga mereka tidur kembali di waktu malam. Pada waktu siang, para santri pergi ke sekolah

⁶⁶ HS, Mastuki, El-sha, M. Ishom, *Intelektualisme Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), h. 1.

umum untuk belajar ilmu formal, pada waktu sore mereka menghadiri pengajian dengan kyai atau ustaz mereka untuk memperdalam pelajaran agama dan Alquran.⁶⁷

Ada pula pesantren yang mengajarkan pendidikan umum, di mana persentase ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam daripada ilmu umum (matematika, fisika, dan lainnya). Ini sering disebut dengan istilah pondok pesantren modern, dan umumnya tetap menekankan nilai-nilai dari kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, dan pengendalian diri. Pada pesantren dengan materi ajar campuran antara pendidikan ilmu formal dan ilmu agama Islam, para santri belajar seperti di sekolah umum atau madrasah. Pesantren campuran untuk tingkat SMP kadang-kadang juga dikenal dengan nama Madrasah Tsanawiyah, sedangkan untuk tingkat SMA dengan nama Madrasah Aliyah. Namun, perbedaan pesantren dan madrasah terletak pada sistemnya.

Pesantren memasukkan santrinya ke dalam asrama, sementara dalam madrasah tidak. Ada juga jenis pesantren semimodern yang masih mempertahankan kesalafannya dan memasukkan kurikulum modern di pesantren tersebut.⁶⁸ Sebab-sebab terjadinya modernisasi Pesantren di antaranya: Pertama, munculnya wacana penolakan taqlid dengan “kembali kepada Alquran dan sunah” sebagai isu sentral yang mulai ditadaruskan sejak tahun 1900. Maka sejak saat itu perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda, atau kalangan reformis dengan kalangan ortodoks/konservatif, mulai mengemuka sebagai wacana publik.

Kedua, kian mengemukakan wacana perlawanan nasional atas kolonialisme belanda. Ketiga, terbitnya kesadaran kalangan Muslim untuk memperbaharui organisasi keislaman mereka yang berkonsentrasi dalam aspek sosial ekonomi. Keempat, dorongan kaum Muslim untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam. Salah satu dari keempat faktor tersebut dalam pandangan Karel A. Steenbrink, yang sejatinya selalu menjadi sumber inspirasi para pembaharu Islam untuk melakukan perubahan Islam di Indonesia.⁶⁹

4. Pembinaan Pesantren

⁶⁷Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), h. 27.

⁶⁸Haedari, H.Amin, *Transformasi Pesantren* (Jakarta: Media Nusantara, 2007), h. 3.

⁶⁹ Karel A. Steenbirk, *The Madrasah* (Boulder: The University of Colorado Press, 1984), h. 73.

Tantangan pendidikan dewasa ini untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan tangguh semakin berat pendidikan tidak cukup hanya berhenti pada memberikan pengetahuan yang paling mutakhir, namun juga harus mampu membentuk dan membangun sistem keyakinan karakter kuat setiap peserta didik, sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan menemukan tujuan hidupnya.

Pendidikan di sekolah tidak lagi cukup hanya dengan mengajar peserta didik membaca, menulis, dan berhitung, kemudian lulus ujian, dan nantinya mendapatkan pekerjaan yang baik. Tetapi sekolah harus mampu mendidik peserta didik untuk mampu memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Sekolah juga perlu membantu orang tua untuk menemukan tujuan hidup setiap peserta didik.

Perkembangan dunia yang begitu cepat dan semakin kompleks dan canggih, prinsip pendidikan untuk membangun etika dan karakter peserta didik tetap harus dipegang. Pembangunan etika dan karakter peserta didik dilakukan dengan cara yang berbeda atau kreatif sehingga mampu mengimbangi perubahan kehidupan. Pendidik juga harus mampu menyiapkan peserta didik untuk bisa menangkap peluang dan kemajuan IPTEK.

Pembinaan Karakter sangat penting dalam membangun Sumber Daya Manusia yang kuat. Pembinaan karakter merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu melalui pendidikan karakter harus menyertai semua aspek kehidupan termasuk di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai tempat yang strategis untuk membentuk karakter siswa. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dalam segala ucapan, sikap, dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik dan kuat.

Lembaga pendidikan pondok pesantren sebagai lembaga penyiaran dan penyebaran agama dan sosial keagamaan memiliki banyak peran serta dapat membentuk kepribadian seseorang siswa-siswi. Bahkan seiring dengan terus berkembangnya berbagai fenomena pendidikan akhir-akhir ini, sebagai akibat globalisasi yang kian merambah dalam berbagai dimensi kehidupan, kehadiran pondok pesantren diharapkan mampu memberi solusi terhadap berbagai persoalan tersebut termasuk di dalamnya Pondok Pesantren Modern Terpadu Daar al-Mursyid.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, setelah rumah tangga.⁷⁰

Pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri.⁷¹ Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai “*training center*” yang otomatis menjadi “*cultural center*” Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara *defacto* tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.⁷²

Kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat sangat diharapkan dapat memberikan angin segar terhadap masyarakat. Kemudian pesantren dengan pengaruhnya yang cukup luas berkembang pesat hampir di seluruh daerah di Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, memadukan nilai-nilai pendidikan Islam dan umum yang bertujuan untuk menuntut ilmu serta memperdalam ilmu pengetahuan agama di samping penyebaran ilmu agama sehingga mewujudkan masyarakat yang memiliki keimanan dan keislaman dalam mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Tugas dan tanggung jawab seseorang guru di pondok pesantren, tentu tidak terlepas dari guru yang memiliki kemampuan, keahlian, pembekalan bahkan kharisma yang cukup sehingga sedikit banyaknya diteladani masyarakat disekelilingnya maupun masyarakat yang menimba ilmu di dalamnya.

Sistem pendidikan pondok pesantren mencakup seluruh aspek yakni kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hal ini memberikan keyakinan bahwa guru agama harus dapat menampilkan sosok pribadi yang baik dan berakhlakul karimah yang di dasarkan pada komitmen keislamannya serta harus memiliki kemampuan profesional di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat mencontoh segala gerak-gerik guru-guru maupun santri yang telah mengecap studi di pesantren. Dengan demikian indikator kemampuan, keahlian bahkan keprofesionalan sebagaimana dikemukakan

⁷⁰Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* Cet.II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 191.

⁷¹Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 40.

⁷²*Ibid.*, h. 40.

di atas harus dimiliki setiap guru agama Islam bahkan dilengkapi nilai-nilai kepribadian yang utama.

Penyelenggaraan pembinaan karakter di pondok pesantren dilakukan secara terpadu melalui 3 jalur, yaitu: (1) pembelajaran, (2) manajemen, dan (3) ekstrakurikuler. Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.

Bila tidak dibarengi dengan nilai-nilai kepribadian utama, segala usaha tersebut hanya memiliki hasil sebatas mengajarkan pengetahuan kepada subjek didik atau dalam arti kata pemindahan ilmu pengetahuan saja. Aspek moralnya tidak tersentuh, atau dalam bahasa Sikun Pribadi, harus memiliki aspek kognitif, afektif dan psikomotorik di samping aspek konatif (motivasi).⁷³ Keberadaan pesantren yang demikian sangat diharapkan dapat membina dan meningkatkan pelaksanaan keagamaan pada masyarakat sekitarnya terutama dalam pembinaan karakter.

⁷³Sikun Pribadi, *Mutiara-mutiara Pendidikan* Cet. 1, (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 99.